

**PROFIL KESIAPAN MASYARAKAT DALAM MENYONGSONG
WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DI JAWA
TIMUR**

SUTOMO DJOKOSUJOSO
IKIP Surabaya

ABSTRACT. *Several indicators, such as comprehending and opinions of the society, were employed to detect the readiness of the society in facing the compulsory 9-year basic education. The population of this study is people of East Jawa divided into 4 strata, namely surplus area, adequate fertile area, non-fertile area, and nondeveloped area. The constrains faced by the people are among others: their low economic status, and their unawareness of the importance of education.*

Pendahuluan

Mulai awal Repelita VI diharapkan pendidikan dasar 9 tahun sudah terwujud dan sepenuhnya dijalankan. Untuk itu, selama 5 tahun di dalam Repelita V, dasar ke arah perwujudan pendidikan dasar 9 tahun itu sudah harus diletakkan. (Suara Karya, 19 Agustus 1989). Untuk menunjang perwujudan tersebut, pihak pengelola, instansi yang terkait, dan pihak masyarakat sudah perlu mempersiapkan kondisi setepat mungkin ke arah terlaksananya wajib belajar 9 tahun.

Atas dasar kenyataan ini, maka untuk mengantisipasi pelaksanaannya, kita perlu mengadakan penelitian tentang kesiapan masyarakat dalam menyongsong wajib belajar 9 tahun. Dengan cara ini diharapkan bahwa pelaksanaan wajib belajar 9 tahun nanti dapat berjalan dengan lancar.

Dalam rangka realisasi wajib belajar 9 tahun, selain SLTP konven-

sional (SMP dan MTs), diharapkan pula bahwa SMP Terbuka (SMPT) dan Kejar paket B dapat menjadi alternatif lain dalam menampung lulusan SD. Sebagai konsekuensi dari alternatif ini, kita perlu menyediakan guru yang memiliki kualifikasi yang gayut (relevant) dengan keperluan itu. Dalam pelaksanaannya, SMP Terbuka membutuhkan dua macam guru yaitu guru pembina (guru SMP yang menjadi induk SMPT) dan guru pembimbing (diangkat dari masyarakat setempat). Hal ini merupakan salah satu kelemahan SMP Terbuka selama ini, karena kedua macam tenaga gurunya bekerja secara sambilan. Demikian pula penyediaan tutor untuk Program Kejar Paket B memerlukan perencanaan yang memadai agar pelaksanaan pembelajarannya dapat berjalan seperti yang diharapkan.

Pelita V merupakan era perintisan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (wajib belajar SLTP) yang dititikberatkan pada penciptaan kondisi, sehingga pada awal Pelita VI, wajib belajar SLTP sudah siap dicanangkan. Rintisan tersebut tertuang di dalam GBHN tahun 1988 yang antara lain menyebutkan bahwa titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan serta perluasan kesempatan belajar pada jenjang dan jenis pendidikan menengah dalam rangka persiapan perluasan wajib belajar untuk pendidikan menengah tingkat pertama. Belajar di SLTP adalah kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia yang telah menamatkan SD atau sederajat dengan batas usia 13-15 tahun. Mereka wajib mengikuti sampai tamat pendidikan SLTP atau yang sederajat.

Pembangunan nasional, termasuk pembangunan pendidikan, hanya dapat terlaksana dan berhasil jika masyarakat diikutsertakan secara aktif. Oleh sebab itu masyarakat harus diajak ikut serta dalam setiap tahap proses pembangunan sesuai dengan tingkat pemahamannya. Inilah usaha *empowering the society* yang membuat masyarakat itu merasa bahwa pembangunan itu pada hakikatnya adalah untuk kepentingannya sendiri. Inilah hakikat dan tujuan "pembangunan dari bawah" dengan masyarakat bukan sekedar menjadi penonton pembangunan atau apalagi hanya menjadi alat pembangunan belaka (H.A.R. Tilaar, 1993 :G-24).

Namun kondisi masyarakat, khususnya kondisi sosial ekonomi serta faktor budaya, ikut berpengaruh terhadap sampai seberapa jauh masyarakat memahami dan menanggapi proses pembangunan termasuk pembangunan pendidikan bagi masyarakat yang kurang beruntung. Pada umumnya, mereka masih dihadapkan pada masalah ekonomi yang berat. Faktor ekonomi ini, pada gilirannya, akan memudahkan motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak mereka.

Hasil penelitian tentang kesiapan pelaksanaan program wajib bela-

jar 9 tahun yang dilakukan oleh Tim Universitas Merdeka Malang di provinsi Dati I Kalimantan Tengah, provinsi Dati I Jawa Timur, dan Wilayah Kepulauan (1993) menunjukkan beberapa temuan yang cukup menggembirakan, antara lain, dalam segi kesiapan masyarakat dalam menghadapi wajib belajar 9 tahun, secara keseluruhan, lebih banyak yang berpendapat bahwa mereka siap daripada yang tidak siap. Untuk informasi program wajib belajar 9 tahun, ketidaktahuan masyarakat relatif kecil (25,42% menurut orang tua dan 26,83% menurut tokoh masyarakat).

Namun dari hasil penelitian di atas juga ditemukan hal yang tidak atau kurang menggembirakan, antara lain, dalam pelaksanaan kelompok kerja wajib belajar 9 tahun, kendala yang diketemukan oleh camat sebagai ketua, dan kandep dikbud kecamatan adalah masyarakat tidak menguasai informasi tentang wajib belajar 9 tahun. Beberapa daerah yang dinyatakan sebagai daerah perintisan wajar 9 tahun (antara lain kabupaten Pamekasan dan kabupaten Blitar), ternyata kesiapan dan keterpaduan upaya dalam rangka pelaksanaan wajar 9 tahun dirasakan masih saja sama dengan yang dilakukan di daerah lain yang bukan sebagai daerah perintisan.

Hasil penelitian "Pengembangan Model Program Lintas Sektor dan Lintas Disiplin Dalam Rangka Menyukseskan Program Wajib Belajar 9 Tahun" oleh IKIP Surabaya (1993) menemukan hal-hal sebagai berikut:

- Motivasi belajar kurang dan motivasi melanjutkan pendidikan ke SLTP relatif rendah.
- Sebagian waktu dan tenaga tersita untuk mencari nafkah
- Karakteristik orang tua yang tinggal di daerah pedesaan antara lain adalah: kurang menyadari pentingnya pendidikan. Banyak yang merasa berat untuk menyekolahkan anaknya ke SLTP, banyak yang berpendapat bahwa sekolah tidak menjamin anaknya mendapat pekerjaan, dan motivasi untuk memenuhi kebutuhan hidup (makan) lebih berat daripada motivasi menyekolahkan anaknya.
- Gairah untuk mengikuti Kejar Paket cenderung turun. Kejar Paket A yang sudah berjalan kini banyak yang terhenti. Kebanyakan Kejar Paket A baru sampai A10. (Mohamad Nur, 1993: 1-2).

Berbagai informasi hasil penelitian di atas perlu mendapatkan perhatian yang cukup seksama, agar gagasan "pembangunan dari bawah" tidak hanya sekedar menjadi suatu gagasan saja. Usaha itu harus dibarengi dengan adanya upaya secara terpadu untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang ada. Sudah barang tentu upaya yang demikian ini harus dilakukan secara

bertahap seiring dengan makin tumbuh dan meningkatnya respons (sambutan, tanggapan) masyarakat terhadap hal-hal yang dmereka anggap baru.

Masalah Penelitian

Sehubungan dengan itu, penelitian ingin mengetahui seberapa jauh kesiapan masyarakat di daerah perintisan wajib belajar 9 tahun terhadap pelaksanaan wajib belajar 9 tahun.

Metoda Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara *expost facto* dalam arti mendasarkan datanya pada peristiwa yang telah terjadi. Di samping itu penelitian ini juga merupakan penelitian eksploratif dan deskriptif karena berusaha menemukan dan menggambarkan profil tentang kesiapan masyarakat dalam menyongsong wajib belajar 9 tahun.

Populasi penelitian ini adalah masyarakat Jawa Timur. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* untuk menentukan daerah dan responden penelitian. Adapun penentuan daerah ini didasarkan pada wilayah pembangunan Jawa Timur yang meliputi 4 zona yaitu zona surplus yang diwakili oleh kabupaten Kediri, zona kesuburan sedang oleh kabupaten Bojonegoro, zona tandus atau tidak subur oleh kabupaten Ponorogo, dan zona kepulauan atau belum berkembang oleh kabupaten Sumenep.

Selanjutnya, dari tiap kabupaten diambil satu kecamatan, dan dari tiap kecamatan diambil dua desa. Penetapan desa yang diambil didasarkan pada ketentuan berupa satu desa yang dekat ke kota, dan satu desa yang jauh dari kota.

Responden penelitian dari setiap desa dikelompokkan menjadi 4 kategori yaitu:

- (1). Pemuka masyarakat, termasuk kepala sekolah dan guru
- (2). Warga masyarakat dewasa, yang berumur 17 tahun ke atas
- (3). Warga masyarakat berumur 7-16 tahun dan tidak bersekolah
- (4). Siswa SD/MI dan SLTP/MTs.

Jumlah seluruh responden adalah 260 orang, dengan rincian, untuk desa dekat kota 141 orang dan untuk desa jauh dari kota 119 orang. Pe-

ngumpulan data dilakukan dengan metoda kuesioner atau angket dan wawancara. Kedua metoda ini digunakan untuk mengungkapkan variabel

- (a). Identitas responden
- (b). Pemahaman tentang wajib belajar 9 tahun
- (c). Tanggapan terhadap wajib belajar 9 tahun
- (d). Upaya memasyarakatkan wajib belajar 9 tahun
- (e). Kendala yang mungkin dihadapi dan cara penanggulangannya
- (f). Pendapat warga masyarakat tentang cara memotivasi/merealisasikan program wajib belajar 9 tahun.

Dengan memperhatikan pengelompokan responden, variabel, serta jenis data, disusun instrumen pengumpulan data sebagai berikut

SIAP-1.4.: instrumen angket untuk responden pemuka masyarakat, kepala sekolah, dan guru,

SIAP-2: instrumen angket untuk responden siswa SD/MI dan SLTP/MTs,

SIAP-3A.: instrumen angket atau panduan wawancara untuk responden warga masyarakat berumur 7-16 tahun dan tidak bersekolah,

SIAP-3B: instrumen angket atau panduan wawancara untuk responden warga masyarakat dewasa,

Selanjutnya data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan statistika deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Sekalipun informasi tentang wajib belajar 9 tahun telah diterima melalui berbagai media, namun tingkat pemahaman warga masyarakat tidaklah sama di antara pemuka masyarakat, baik untuk desa dekat kota maupun untuk desa jauh dari kota. Dan untuk seluruh kategori wilayah pembangunan pada umumnya mereka menyatakan telah memahaminya.

Tingkat pemahaman bagi warga masyarakat dewasa adalah sangat bervariasi. Untuk daerah surplus, justru untuk desa dekat kota, sebagian besar responden menyatakan belum memahaminya (66,6%) sedangkan untuk desa jauh dari kota malahan kebalikannya, yakni mereka telah memahami-

nya (66,6%). Di Bojonegoro yang termasuk daerah berkesuburan sedang, baik untuk desa dekat kota maupun untuk desa jauh dari kota, malahan semua responden (100%) menyatakan sudah memahaminya. Untuk daerah tandus, baik untuk desa dekat kota maupun untuk desa jauh dari kota, sebagian besar responden warga masyarakat dewasa menyatakan belum memahaminya (masing-masing 75% dan 100%). Sedangkan untuk daerah kepulauan yang belum berkembang, untuk desa dekat kota, sebagian besar responden (66,6%) belum memahaminya, tetapi untuk desa jauh dari kota, 50% responden telah memahaminya dan 50 % belum memahaminya.

Tentang rintisan wajib belajar tampaknya tidak terdapat perbedaan jawaban yang jelas, dilihat dari kategori wilayah pembangunan, letak desa (dekat dan jauh dari kota), dan kelompok responden. Hal ini terlihat dari jawaban responden warga masyarakat dewasa. Di Kediri (surplus), untuk desa dekat kota justru semua responden (100%) menyatakan belum mengetahui adanya rintisan wajib belajar, tetapi untuk desa jauh dari kota, sebagian besar responden (66,6%) menyatakan sudah mengetahuinya. Hal yang serupa dialami pula oleh Bojonegoro (kesuburan sedang) dan Sumenep (kepulauan atau belum berkembang). Malahan di Sumenep, untuk desa dekat kota, sebagian besar responden (66,6%) mengatakan tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.

Banyak siswa yang belum mengetahui adanya rintisan wajib belajar. Untuk desa dekat kota di tiga wilayah pembangunan, yakni Bojonegoro (kesuburan sedang) Ponorogo (tandus), dan Sumenep (kepulauan atau belum berkembang), masing-masing 66,6%, 80%, dan 71,4% siswa yang belum mengetahuinya. Untuk Kediri (surplus), wajarlah bila kebanyakan siswa di desa dekat kota sudah mengetahui adanya rintisan wajib belajar (62,5%) dan untuk desa jauh dari kota kebanyakan siswa belum mengetahuinya (66,6%). Tetapi untuk Bojonegoro, (kesuburan sedang) justru keadaannya malahan terbalik, yakni kebanyakan siswa di desa jauh dari kota sudah mengetahui adanya rintisan wajib belajar (66,6%) dan untuk desa dekat kota dengan angka persentase yang sama (66,6%) menyatakan belum mengetahuinya.

Manfaat wajib belajar 9 tahun yang dirasakan oleh semua kategori wilayah pembangunan adalah di samping meningkatkan pengetahuan, juga dapat meningkatkan pendapatan. Manfaat yang berkenaan dengan meringankan beban orang tua untuk membiayai sekolah anaknya hanya dirasakan oleh daerah tandus, sedangkan manfaat untuk memperoleh STTB SLTP dirasakan oleh daerah kepulauan atau belum berkembang.

Semua responden (warga masyarakat dewasa) dari hampir semua wilayah pembangunan, baik untuk desa dekat dari kota maupun untuk desa jauh dari kota, menyatakan bahwa orang tua bersedia menyekolahkan anak-

nya yang berumur 7-16 tahun yang kini belum bersekolah.

Hal yang dirasakan berat dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun adalah kurang mempunyainya orang tua untuk membiayai pendidikan anak mereka. Hal ini dinyatakan oleh sebagian responden (warga masyarakat yang tidak bersekolah) di semua wilayah pembangunan, baik untuk desa dekat kota maupun untuk desa jauh dari kota. Namun bagi responden siswa sekolah, hal yang dirasakan berat, selain kurang mempunyai orang tua yang mampu membiayai pendidikan anak-anaknya, juga mengalami kesulitan dalam membagi waktu karena mereka membantu pekerjaan orang tua (Kediri untuk desa jauh dari kota sebesar 42,85%, dan Ponorogo untuk desa jauh dari kota sebesar 50%). Walaupun demikian sebagian besar responden siswa sekolah di semua wilayah pembangunan, baik untuk desa dekat dari kota maupun untuk desa jauh dari kota, menyatakan persetujuannya untuk melaksanakan wajib belajar 9 tahun.

Bentuk belajar secara kelompok dengan buku paket agaknya diminati oleh warga masyarakat di empat kategori wilayah pembangunan, baik untuk desa dekat dari kota maupun untuk desa jauh dari kota. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari sebagian besar responden (pemuka masyarakat), yakni di Kediri untuk desa dekat dari kota, 68,42%, di Bojonegoro untuk desa dekat dari kota, 43,4%, dan desa jauh dari kota, 76,47%, di Ponorogo untuk desa dekat dari kota dan untuk desa jauh dari kota masing-masing 38,8% dan 41,1%, dan di Sumenep untuk desa dekat kota dan untuk desa jauh dari kota masing-masing 44,4% dan 47%. Mereka juga meminati sekolah berbentuk SMP Terbuka, namun minat ini hanya terdapat pada beberapa kategori wilayah pembangunan dan beberapa desa yakni di Kediri untuk desa jauh dari kota (42,1%), di Ponorogo untuk desa dekat dari kota (38,8%), dan Sumenep untuk desa dekat dari kota (33,3%). Perlu juga di kemukakan bahwa tampaknya mereka kurang meminati bentuk belajar melalui pendidikan sekolah. Terbukti hanya satu daerah dan satu desa saja yang memberikan pernyataan untuk itu, yakni di daerah Ponorogo untuk desa jauh dari kota (47%).

Menurut sebagian besar responden (pemuka masyarakat dan warga masyarakat dewasa) terutama di daerah Ponorogo (tandus) dan Sumenep (kepulauan atau belum berkembang), cara yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk memasyarakatkan wajib belajar 9 tahun adalah memberikan keringanan SPP atau pembebasan SPP. Tetapi untuk daerah Kediri (surplus) dan Bojonegoro (kesuburan sedang), cara yang sebaiknya dilakukan pemerintah ialah melakukan penyuluhan massal disertai dengan pemutaran film atau melakukan penyuluhan ke rumah-rumah penduduk.

Untuk seluruh kategori wilayah pembangunan, pendapat warga masyarakat tentang cara memotivasi atau merealisasi program wajib belajar 9 tahun adalah sebagai berikut.

- a. Penekanan biaya pendidikan serendah-rendahnya atau pembebasan SPP
- b. Penyuluhan ke desa-desa tentang pentingnya pendidikan, termasuk wajib belajar 9 tahun.
- c. Memperbanyak petugas lapangan yang berkualitas (termasuk guru SLTP dan tutor kejar paket B) disertai dengan pemberian perangsang yang memadai.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

Pemahaman tentang wajib belajar 9 tahun. Sekalipun informasi tentang wajib belajar 9 tahun telah diterima melalui berbagai media, namun tingkat pemahaman warga masyarakat tentang wajib belajar 9 tahun tidaklah sama. Pemuka masyarakat menyatakan telah memahaminya, baik untuk desa dekat kota maupun untuk desa jauh dari kota dan untuk semua kategori wilayah pembangunan (surplus, kesuburan sedang, tandus, dan daerah kepulauan atau belum berkembang). Namun bagi warga masyarakat dewasa, pemahaman mereka tentang wajib belajar 9 tahun sangat bervariasi. Untuk daerah surplus, justru untuk desa dekat kota sebagian besar responden menyatakan belum memahaminya, sedangkan untuk desa jauh dari kota malahan kebajikannya, yakni telah memahaminya. Di Bojonegoro (sedang kesuburannya) yang kategorinya terletak di bawah Kediri (surplus), baik untuk desa dekat kota maupun untuk desa jauh dari kota, malahan semua responden masyarakat dewasa menyatakan telah memahaminya.

Tentang rintisan wajib belajar, bagi masyarakat yang telah memahami wajib belajar, tidak berarti dengan sendirinya juga telah mengetahui adanya rintisan wajib belajar. Hal ini dapat diketahui dari jawaban responden warga masyarakat dewasa di Bojonegoro. Untuk desa dekat kota, semua responden (100%) menyatakan telah memahami wajib belajar 9 tahun, namun sebagian besar dari mereka (66,6%) belum mengetahui adanya rintisan wajib belajar. Demikian pula jika dilihat dari letak desa (dekat dan jauh dari kota), ternyata sebagian besar responden warga masyarakat dewasa di desa dekat kota belum mengetahui adanya rintisan wajib belajar, tetapi mereka

dari desa jauh dari kota justru sudah mengetahuinya. Malahan di Sumenep yang berkategori wilayah pembangunan paling bawah (kepulauan dan belum berkembang), sebagian besar responden warga masyarakat dewasa di desa dekat kota (66,6%) tidak tahu adanya rintisan wajib belajar, tetapi sebagian besar mereka di desa jauh dari kota (50%) sudah mengetahuinya. Adapun bentuk rintisan wajib belajar tersebut berupa mendata anak usia sekolah, mendata anak seusia tidak sekolah, mengadakan penyuluhan wajib belajar, membentuk kejar paket B, dan mendirikan SMP terbuka.

Mengenai manfaat wajib belajar yang dapat dirasakan oleh warga masyarakat di semua kategori wilayah pembangunan adalah di samping meningkatkan pengetahuan juga dapat meningkatkan pendapatan.

Tanggapan Tentang Wajar 9 Tahun. Hal yang dirasakan berat dalam pelaksanaan wajib belajar ialah kurang mampunya orang tua dalam membiayai pendidikan anak-anaknya. Responden siswa sekolah selain kurang mempunyai orang tua yang mampu memberi biaya, masih ditambah dengan adanya kesulitan membagi waktu karena membantu pekerjaan orang tua.

Bentuk belajar secara kelompok dengan buku paket agaknya paling diminati oleh warga masyarakat di empat kategori wilayah pembangunan, baik untuk desa dekat kota maupun untuk desa jauh dari kota. Selain itu, bentuk belajar melalui SMP Terbuka juga diminati, namun hanya untuk beberapa kategori wilayah pembangunan dan beberapa daerah saja yakni di Kediri untuk desa jauh dari kota, Ponorogo untuk desa dekat kota, dan Sumenep untuk desa dekat kota.

Upaya memasyarakatkan Wajib Belajar 9 Tahun. Cara yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk memasyarakatkan wajib belajar ialah memberikan keringanan SPP atau pembebasan SPP. Selain itu perlu dilakukan penyuluhan ke rumah-rumah penduduk.

Kendala Yang Dihadapi Berbagai kendala yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- (a). Kurang mampunya ekonomi masyarakat
- (b). Besarnya biaya pendidikan
- (c). Kurang menyadari pentingnya pendidikan termasuk wajib belajar
- (d). Kurangnya tenaga guru/tutor
- (e). Sedikitnya jumlah SLTP
- (f). Kurangnya sarana dan prasarana

- (g). Guru SLTP tak bertempat tinggal di desa ini
- (h). Terbatasnya dana untuk guru dan tutor.

Pendapat Warga Masyarakat Tentang Cara Memotivasi atau Merealisasi Wajib Belajar 9 Tahun adalah sebagai berikut.

- a. Penekanan biaya pendidikan serendah-rendahnya/ pembebasan SPP.
- b. Penyuluhan ke desa-desa tentang pentingnya pendidikan, termasuk wajib belajar 9 tahun..
- c. Memperbanyak petugas lapangan yang berkualitas disertai pemberian perangsang yang memadai.
- d. Mengembangkan program-program PLS antara lain kursus-kursus
- e. Menyediakan fasilitas pendidikan/sarana belajar.
- f. Peningkatan kerja sama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat.

Bertolak dari kesimpulan penelitian tersebut, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Mengingat tingkat pemahaman warga masyarakat tentang wajib belajar 9 tahun tidak sama, perlu dicari cara yang tepat dalam memasyarakatkan wajar 9 tahun, antara lain, melalui penggunaan bahasa yang komunikatif sehingga isi pesan mudah diterima. Hendaknya, semua bentuk komunikasi lisan segera dibarengi dengan tindakan nyata dan mengikutsertakan warga masyarakat (melalui pemuka masyarakat dan pimpinan lembaga/organisasi sosial) untuk ikut serta menyebarkan konsep wajib belajar 9 tahun.

2. Mengikutsertakan secara aktif warga masyarakat (melalui pemuka masyarakat dan pimpinan lembaga/organisasi sosial) dalam rintisan wajib belajar 9 tahun agar pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun dapat berjalan dengan lancar.

3. Dengan memperhatikan berbagai kendala yang dihadapi dalam menyongsong pelaksanaan wajib belajar 9 tahun, sebagaimana dapat diidentifikasi dari penelitian ini, maka upaya membelajarkan warga masyarakat perlu dibarengi berbagai upaya secara terpadu untuk meningkatkan pendapatan (*income generating activity*). Ini berarti bahwa dalam penanganan program wajar seyogyanya dilakukan pendekatan lintas sektoral dan lintas disiplin.

Daftar Pustaka

- Anton Priatno, 1991. "Pendidikan Pasca UU No. 2 Tahun 1989". Makalah Disampaikan pada Temu Wicara Peta Masalah Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Informasi Alocita, 20 Januari 1991 di Hotel Simpang Surabaya.
- Anwas Iskandar, 1991, "Pemberantasan Buta Huruf di Indonesia." Makalah pada Seminar Tindak Lanjut Konferensi Dunia tentang Pendidikan Bagi Semua. Jakarta, 13-15 Maret 1991.
- , 1992. "Pendidikan Luar Sekolah Dalam Sistem Pendidikan Nasional." Makalah disampaikan pada Seminar dan Temu Kolegial Nasional V PLS di Yogyakarta tanggal 16-17 Januari 1992.
- Bagian Proyek Pembinaan Pelaksanaan Wajib Belajar,¹ Direktorat Pendidikan Dasar, Ditjen Dikdasmen, Depdikbud RI, 1990a. "Wajib Belajar di Indonesia Jakarta" Ditjen Dikdasmen Depdikbud.
- , 1990b, "Data anak Usia 7-12 Tahun dalam Rangka Pembinaan Wajib Belajar Tahun 1989/1990." Jakarta : Depdikbud.
- Cosmas Batubara, 1992, "Pendidikan Luar Sekolah Dalam Rangka Era Globalisasi." Makalah disampaikan pada Seminar dan Temu Kolegial Nasional V PLS di Yogyakarta, Tanggal 16-17 Januari 1992.
- Dit.Dikmas, 1983, "Risalah Buku Paket A, Jakarta: Ditjen Diklusepora. Dirjen Dikdasmen, 1991, Kebijakan dan Strategi Pendidikan Dasar Sampai Tahun 2000 (suatu telaah Strategi). Jakarta Depdikbud." Dikdasmen.
- Ditjen Diklusepora, 1992, "Informasi APPEAL Indonesia" Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Ditjen Diklusepora.
- Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1988.
- Kanwil Depdikbud, Jawa Timur, 1991, "Informasi Data Tentang Pendidikan di Jawa Timur."

- Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat No. 01/Kep/Menko/L/1991. Tentang Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Moegiadi, 1991, Rencana dan Program Pendidikan Berkelanjutan, makalah disampaikan pada Seminar Tindak Lanjut Konferensi Dunia tentang Pendidikan Bagi Semua di Jakarta, 13-15 Maret 1991.
- Mohamad Nur, 1993. "Pengembangan Model Program Lintas Sektoral dan Lintas Disiplin Dalam Rangka Menyukkseskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun." Makalah disajikan pada seminar Hasil Pengembangan Model Lintas Sektoral dan Lintas Disiplin Dalam Rangka Menyukkseskan Wajib Belajar 9 Tahun Periode I 1992/1993 tanggal 18-19 Oktober 1993 di IKIP Surabaya.
- Pusat Informatika Balitbang Dikbud, 1989, "Arus Murid Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Tahun 1983/1984 - 1983/1989." Jakarta : Pusat Informatika Balitbang Dikbud RI. PP No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah Diperbanyak oleh Panitia Temu Kologial Nasional Pendidikan Luar Sekolah di Yogyakarta. PP No. 28 Tahun 1989, Tentang Pendidikan Dasar.
- Simanjuntak, Payaman, 1992. "Ketenagaan Pendidikan Luar Sekolah." Makalah disampaikan pada Seminar dan Temu Kolegial Nasional V PLS di Yogyakarta tanggal 16-17 Januari 1992.
- Tim IKIP Surabaya, 1991, "Penelitian Tentang Kebutuhan Belajar Dasar di Dalam Konteks Pendidikan Untuk Semua: Kasus Indonesia." Disponsori oleh Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO.
- Tim Peneliti Universitas Merdeka Malang, 1983, "Laporan Hasil Penelitian Tentang Kesiapan Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun." Lembaga Penelitian Umum.
- UURI No. 2 Tahun 1989, Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta : CV Dharma Bhakti.
- World Conference on Education for All, Thailand, March 5-9, 1990